

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah Indonesia pada periode 1959 sampai 1966 adalah masa di mana sistem "Demokrasi Terpimpin" sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia setelah lengsernya Demokrasi Parlementer. Ini dikarenakan sistem Demokrasi Parlementer memang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana Demokrasi Parlementer yang lebih mengarah ke paham liberal sedangkan Indonesia lebih ke sikap gotong-royongnya. Sehingga pada masa Demokrasi Parlementer tersebut terjadi suatu keadaan krisis nasional ataupun ketidakstabilan dibidang sosial-politik maupun keamanan yang mengancam keselamatan negara pada masa itu.

Ketidakkcocokan sistem Parlementer dengan jiwa bangsa Indonesia dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer tersebut. Seperti adanya pergantian kabinet-kabinet. Setidaknya hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun yaitu tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 telah terdapat tujuh kabinet yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Sehingga bila diambil rata-rata maka umur dari setiap kabinet tersebut hanya dapat bertahan hanya sekitar satu setengah tahun. Itu artinya apapun yang telah direncanakan dari setiap kabinet-kabinet tersebut tidak dapat terealisasikan secara maksimal. Selain itu terdapat juga pergejolakan-pergejolakan didaerah daerah seperti di Sumatera

dan Sulawesi yang dilakukan PRRI-Permesta, dimana pergejolakan ini ternyata didukung oleh partai oposisi pemetintah seperti PSI dan Masyumi. Bukan hanya itu keadaan pada waktu itu juga semakin diperparah ketika Konstituante gagal dalam usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Konstituante ini adalah suatu badan yang dibentuk pada masa Demokrasi Parlementer untuk menyusun Undang-undang Dasar yang baru karena UUD Sementara tahun 1950 yang dipakai pada masa itu memang tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia.

Presiden Sukarno dalam rangka untuk menyelamatkan negara dari ketidakstabilan sosial-politik dan keamanan pada masa itu kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 Tahun 1959 atau yang sering disebut dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang inti isi pokoknya ada tiga yaitu; pertama, pembubaran Konstituante; kedua, kembali berlakunya UUD 1945; dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Sejak dikeluarkannya Dekerit Presiden ini maka babak Demokrasi Parlementer pun berakhir dan awal bagi Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini Presiden Sukarno menjadi tokoh sentral pada masa itu. Sehingga akibat dari sentralisasi kekuasaan ini berdampak pada berbagai penyelewengan yang terjadi.

Sistem Parlementer yang menempatkan posisi seorang Presiden sebagai Kepala Negara simbolis, yang pada masa Demokrasi Parlementer dipangku oleh

Presiden Sukarno adalah salah satu faktor yang membuat Presiden Sukarno kemudian meningkatkan kekuasaannya pada masa Demokrasi Terpimpin ini.

Strategi Presiden Sukarno dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya dari kekuatan-kekuatan lain seperti partai oposisi (PSI dan Masyumi) masa itu dan tentara (AD) yang mungkin akan mengusik dan menggoyahkan kekuasaannya di pemerintahan Demokrasi Terpimpin yaitu Presiden Sukarno kemudian berusaha untuk menyeimbangi kekuatan-kekuatan ini, dengan pemantapan kembali Nasakom yaitu persatuan antara golongan Nasionalis, Agama dan Komunis. Konsep Nasakom ini sendiri sebenarnya, telah lahir dan dirumuskan oleh Sukarno sejak tahun 1926, yang pada waktu itu diistilahkan dengan tiga hal pokok yakni "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Yang pada intinya di persatukan dalam satu tujuan yaitu Gotong-royong (bekerja bersama-sama) untuk Revolusi Indonesia dalam melawan penjajahan.

Demokrasi Terpimpin yang menjadi wadah pemantapan Nasakom digunakan Presiden Sukarno dalam rangka untuk mempertahankan posisinya. Terlebih lagi dalam hal ini Presiden juga ingin melindungi kerabat politiknya yaitu partai PKI dari serangan-serangan yang dilakukan oleh tentara terhadap PKI karena perbedaan pandangan ideologi. Itu disebabkan karena umumnya keberadaan Nasakom pada masa itu, yang menjadi inti pokok permasalahannya adalah ketika PKI kemudian dimasukkan dalam konsep tersebut bersama-sama dengan usur Nasionalis dan Agama.

Oleh sebab itu, bertitik tolak dari uraian diatas, peneliti merasa tertarik dan bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Nasakom Terhadap Keadaan Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti serta memberi arah sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini, maka identifikasi masalah perlu dirumuskan. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ketidakstabilan sosial-politik dan keamanan pada masa Demokrasi Parlementer
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. Sentralisasi kekuasaan Presiden Sukarno
4. Latar belakang diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin
5. Nasakom pada masa Demokrasi Terpimpin

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi agar lebih terpusat dan tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi masalah penelitian mengenai *“Dampak Nasakom Terhadap Keadaan Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966”*.

1.4 Rumusan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, penulis merasa perlu merumuskan masalah untuk memperoleh jawaban terhadap masalah dan penelitian ini terarah dengan baik. Dengan demikian sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Demokrasi Terpimpin diberlakukan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia?
3. Apa hubungan Nasakom terhadap keadaan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin?
4. Bagaimana dampak Nasakom terhadap politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966?

1.5 Tujuan Penelitian

Penentuan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat mendasar sehingga kegiatan penelitian dilakukan akan lebih terarah dan akan memberikan gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang diberlakukannya Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hubungan Nasakom terhadap keadaan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

4. Untuk mengetahui dampak Nasakom tersebut terhadap politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sering diidentifikasi dengan tujuan penelitian, oleh sebab itu perlu dijelaskan manfaat penelitian dari penulisan ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan masukan bagi peneliti sendiri dan bagi pembaca mengenai dampak Nasakom terhadap keadaan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966.
2. Sebagai bahan informasi kepada generasi muda Indonesia.
3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah dampak Nasakom terhadap keadaan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin
4. Sebagai upaya untuk menelusuri dampak Nasakom terhadap keadaan politik di Indonesia
5. Menambah perbendaharaan karya ilmiah hasil penelitian sejarah di Jurusan Pendidikan Sejarah
6. Menambah perbendaharaan karya ilmiah hasil penelitian sejarah di Universitas Negeri Medan (UNIMED).